

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dipahami sebagai rangkaian proses yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Tujuan dilakukannya pembangunan yaitu untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mempunyai pilihan yang beragam untuk meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan selalu dikenal sebatas pembangunan fisik, seperti pembangunan infrastruktur yang tampak secara nyata. Nyatanya, pembangunan tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur secara fisik, melainkan juga mencakup pembangunan di bidang ekonomi yang memiliki peran penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Amalia et al., 2022).

Pada era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat pencapaian kinerja perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun daerah, adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan kondisi perekonomian dari waktu ke waktu yang tercermin melalui peningkatan aktivitas ekonomi, produksi barang dan jasa, serta pendapatan masyarakat. (Suherman et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai tujuan utama dalam ekonomi makro. Hal ini didasari oleh beberapa alasan seperti peningkatan jumlah penduduk yang menuntut kapasitas produksi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas

mengharuskan pereconomian untuk terus memproduksi lebih banyak barang dan jasa dan upaya pemerataan ekonomi melalui rrealokasi pendapatan cenderung lebih mudah dicapai jika pereconomian berada pada fase pertumbuhan yang tinggi, karena peningkatan aktivitas ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. (Suherman et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan faktor-faktor produksi yang kemudian menjadi pendorong bagi pembangunan ekonomi dalam skala yang lebih luas. Kondisi pertumbuhan yang stabil tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat secara agregat, namun juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah otonom memegang peran sentral dalam mengarahkan, memperbaiki, serta mengintervensi berbagai aktivitas pembangunan guna memastikan perubahan ekonomi yang terencana dan berkelanjutan (Bado, 2021).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara sempurna, pemerintah melakukan berbagai intervensi strategis melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan pada beberapa kegiatan produktif. Tujuan dari pembangunan ekonomi mencakup pencapaian pertumbuhan yang tinggi, stabilitas makroekonomi, serta pemerataan pendapatan. Hal ini krusial karena setiap fase pertumbuhan ekonomi berpotensi diikuti oleh stagnasi, dan sebaliknya, kondisi stagnasi dapat menghambat upaya perluasan akses ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan proses peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil serta pendapatan per kapita riil

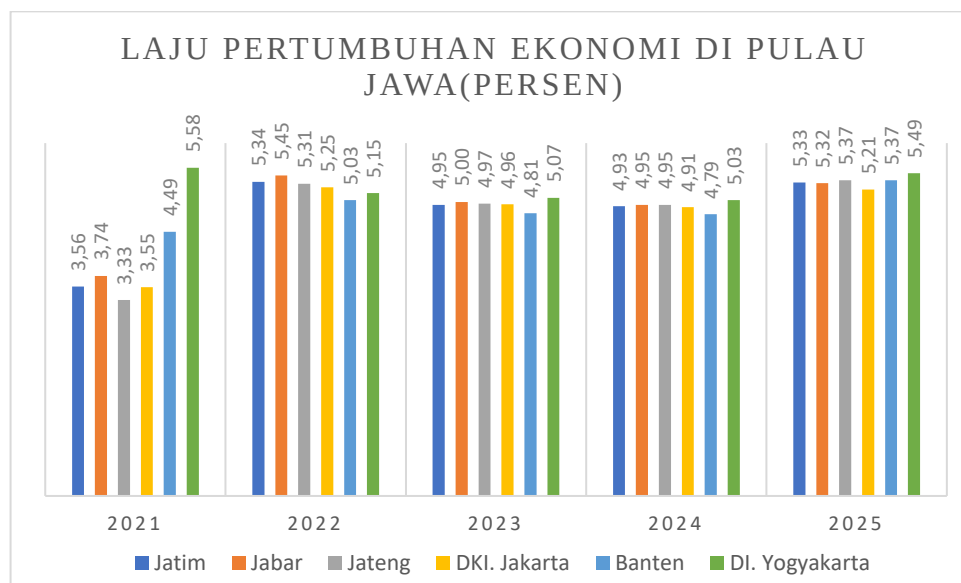
yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas penduduk (Aqila et al., 2023).

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pembangunan suatu wilayah adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari satu periode ke periode berikutnya digunakan untuk menghitung indikator tersebut. Peningkatan aktivitas ekonomi tercermin dari kenaikan PDRB wilayah, yang menunjukkan meningkatnya kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, karena mampu mencerminkan tren aktivitas ekonomi secara akurat, PDRB menjadi tolak ukur yang krusial untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena mampu menunjukkan perkembangan kinerja ekonomi suatu daerah secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga (Dumais, 2022). Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB sebagai indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk analisis pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat dari waktu ke waktu (Indayani & Hartono, 2020).

Di Indonesia setiap daerah memiliki karakteristik dan kapasitas ekonomi yang beragam antar daerah. Di antara berbagai wilayah tersebut, Provinsi-provinsi di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan aktivitas dan kemampuan ekonomi yang relatif lebih tinggi, seiring dengan tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi, di mana hampir separuh penduduk Indonesia bermukim dan menjalankan kegiatan ekonomi di Pulau Jawa (Suparta & Alfajar, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sangat dipengaruhi oleh efektivitas dari beberapa faktor seperti perbandingan kondisi

perekonomian antar wilayah di Pulau Jawa yang dianalisis melalui besaran output yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, sebagaimana tercermin dalam data yang digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2021-2025
(persen)



Sumber: BPS Indonesia, (2026)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2021–2025. Berdasarkan gambar tersebut, seluruh provinsi mengalami perbaikan perekonomian setelah pandemic Covid-19 yang ditunjukkan dengan peningkatan laju pertumbuhan pada tahun 2022. Meskipun demikian, pada periode 2023–2025 pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan dan berfluktuasi di masing-masing provinsi. Hal ini menjelaskan bahwa pascapandemi proses dalam pemulihan perekonomian belum berlangsung secara merata dan stabil di seluruh wilayah Pulau Jawa.

Selama periode pengamatan, Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, Jawa Barat menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup kompetitif dengan menjadi provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 serta menempati posisi kedua pada tahun 2023 dan 2024. Namun, pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami penurunan posisi dibandingkan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa. Menurut (Kemenperin, 2019) kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Jawa Barat merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional dengan kapasitas ekonomi yang besar, laju pertumbuhan ekonominya masih berfluktuasi dan belum selalu menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya kapasitas ekonomi suatu daerah tidak selalu diikuti oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tingginya aktivitas ekonomi di Jawa Barat belum sepenuhnya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan beberapa provinsi lain.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada umumnya diharapkan mampu mendorong perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui meningkatnya aktivitas produksi, kesempatan kerja, dan pendapatan. Namun, laju pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan setiap individu karena manfaat pertumbuhan dapat tersebar secara tidak merata. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah memerlukan sumber daya yang memadai untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Salah satu faktor

yang berperan penting adalah akumulasi modal, yaitu peningkatan stok modal yang digunakan dalam proses produksi. Khususnya dalam pengalokasian belanja pemerintah serta investasi (Manan & Suriadi, 2026). Selain itu, faktor tenaga kerja dalam penyerapan dan kualitas juga memiliki peranan penting dalam menentukan besarnya output ekonomi (Utomo, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005, belanja diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas umum negara atau suatu wilayah yang menyebabkan berkurangnya sekuitas dana lancar dalam satu periode anggaran dan tidak menimbulkan kewajiban pengembalian bagi pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang aset bersih. Dengan demikian, belanja dapat dianggap sebagai kegiatan yang wajib dilakukan pemerintah daerah yang berdampak pada penurunan kekayaan bersih pada periode anggaran yang bersangkutan.

Ekonomi suatu wilayah bisa makin maju jika investasi lancar dan lapangan kerja tersedia luas. Tapi bukan itu saja, pemerintah daerah juga harus memanfaatkan atau mencari peluang lain untuk menambah pemasukan daerah. Apabila pendapatan suatu wilayah mengalami kenaikan dan faktor-faktor pendukungnya dikelola dengan baik, maka stabilitas ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Dumais, 2022). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu berperan aktif dalam memengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai pengeluaran untuk membiayai aktivitas pemerintahan. Pengeluaran tersebut tidak hanya digunakan untuk

memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung kegiatan perekonomian secara luas. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah tersebut adalah belanja modal (Maury et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mengalokasikan belanja modal guna membiayai pembangunan aset tetap dan infrastruktur publik.

Belanja modal dapat dipahani sebagai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong adanya investasi, menciptakan lapangan kerja, serta pendapatan mengalami kenaikan yang berdampak kepada masyarakat sehingga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Belanja modal merujuk pada alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap berwujud yang dapat memberikan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun. Selain itu, seluruh pengeluaran atau biaya yang memiliki nilai ekonomi dalam proses pengadaan aset tetap tersebut juga dicatat sebagai realisasi belanja modal dan akan menambah nilai aset yang dimiliki pemerintah (Milli et al., 2020).

Belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung. Anggarannya berfokus kepada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan perolehan aset tetap. Dengan mengalokasikan belanja modal secara optimal, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terstimulasi, dengan tujuan kesejahteraan masyarakat luas mengalami peningkatan (Aditya, 2022). Namun sebaliknya, jika pengelolaannya dilakukan dengan buruk maka akan berpotensi terjadi

pemborosan anggaran hingga menghambat pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi pemborosan dan kesenjangan sosial akibat tata kelola yang tidak efektif, pemerintah perlu melakukan optimalisasi tata kelola anggaran daerah (Putra et al., 2025).

Gambar 1. 2 Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2025

(miliar rupiah)



Sumber: DJPK Kemenkeu (2026)

Gambar 1.2 belanja modal memegang peranan krusial dalam struktur keuangan pemerintah sebagai instrument investasi jangka Panjang untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang iklim investasi daerah. Namun realitanya, di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya ketimpangan prioritas dimana alokasi dan realisasi belanja modal pemerintah secara konsisten bernilai jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja operasional lainnya yang jangka pendek. Meskipun demikian, belanja modal memiliki karakteristik yang berbeda karena pengeluarannya ditujukan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang dapat digunakan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dengan

demikian, kecilnya proporsi belanja modal tidak serta-merta menunjukkan rendahnya peran belanja tersebut, karena belanja modal berorientasi pada pembentukan aset dan kapasitas daerah yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.

Belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, meskipun memiliki proporsi yang relatif kecil dalam struktur belanja pemerintah daerah, belanja modal memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menariknya, kondisi keterbatasan belanja modal di Provinsi Jawa Barat ini berbanding terbalik dengan investasi yang masuk ke wilayah tersebut.

Investasi dibagi menjadi 2 yaitu domestik atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 12 Tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), peluang investasi domestik mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun arus investasi menunjukkan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu, pada periode tertentu tetap terjadi fluktuasi penurunan.

Peran penting yang dimiliki investasi yaitu menyediakan barang ataupun modal yang dibutuhkan dalam proses produksi. Melalui pengalokasian investasi secara efektif, kapasitas produksi dapat ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan output yang lebih besar. Peningkatan hasil produksi inilah yang

kemudian secara berkelanjutan akan mendorong kenaikan pendapatan daerah dan memperkuat struktur perekonomian (Fajariyah, 2018). Oleh karena itu, investasi diharapkan dapat memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi daerah meskipun nyatanya masih mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Daya tarik investasi Jawa Barat didukung oleh posisi geografis yang strategis, ketersediaan infrastruktur, serta keberadaan kawasan industri yang cukup banyak. Provinsi Jawa Barat secara konsisten menempati peringkat pertama dengan capaian investasi tertinggi di Indonesia. (BPS, 2024)

Gambar 1. 3 Realisasi Investasi Tertinggi di Indonesia Tahun 2021-2025
(Milyar Rupiah)



Sumber: BKPM (2026)

Berdasarkan Gambar 1.3, realisasi investasi di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur merupakan wilayah dengan realisasi investasi tertinggi. Jawa Barat secara

konsisten menempati posisi sebagai salah satu provinsi dengan realisasi investasi terbesar dan menunjukkan kecenderungan peningkatan selama periode tersebut. Realisasi investasi Jawa Barat meningkat dari sekitar Rp175 triliun pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp295 triliun pada tahun 2025. Tingginya realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki daya tarik investasi yang kuat serta didukung oleh aktivitas ekonomi dan industri yang berkembang. Kondisi ini menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah strategis dalam perekonomian nasional. Tingginya realisasi investasi di Jawa Barat menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong aktivitas produksi, memperluas kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan penanaman modal akan menghasilkan tambahan investasi yang secara terus menerus meningkatkan stok modal dalam perekonomian. Bertambahnya stok modal tersebut berperan dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas proses produksi, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas di berbagai sektor ekonomi (Ain', 2021).

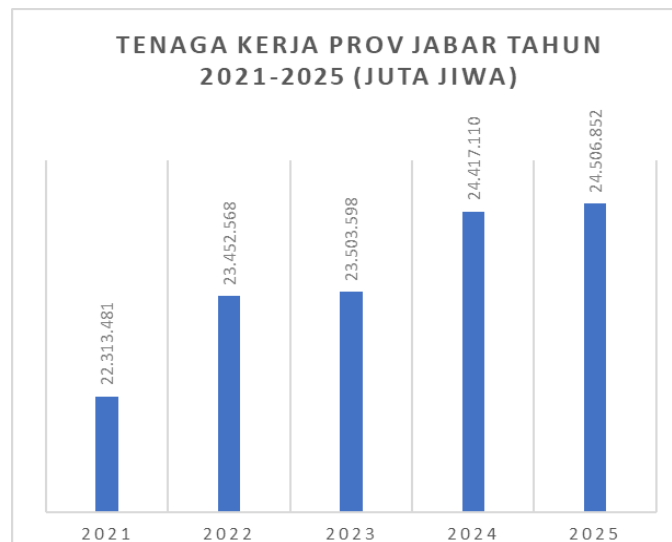
Tenaga Kerja diartikan memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas kerja, baik dalam konteks formal maupun informal yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan tenaga kerja yang memadai, didukung oleh kualitas

sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki, dapat meningkatkan produktivitas sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Asrinda & Iriani, 2022). Dalam kegiatan ekonomi, Tenaga Kerja menjadi faktor produksi yang memiliki peran strategis karena berkontribusi langsung dalam proses produksi dan penyediaan jasa. Keberadaan Tenaga Kerja yang memadai menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas (Faizal & Nurohman, 2022)

Kualitas Tenaga Kerja, yang tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan, dan efisiensi kerja, memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas output, produktivitas, daya saing, serta kemampuan inovasi dalam perekonomian. Tenaga Kerja yang produktif mampu meningkatkan nilai tambah sektor-sektor ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Kartini & Astuti, 2024). Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi masih beragam, tergantung pada karakteristik wilayah dan periode penelitian (Dumais, 2022)

Secara umum, Tenaga Kerja merupakan salah satu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketersediaan Tenaga Kerja yang berkualitas dan terserap secara optimal terhadap meningkatkan produktivitas serta memperkuat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga Kerja diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Kurniasari & Amaliyah, 2023).

Gambar 1. 4 Tenaga Kerja Tahun 2021-2025 (Juta Jiwa)



Sumber: BPS Prov. Jawa Barat (2026)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 22.313.481 orang, kemudian meningkat menjadi 23.452.568 orang pada tahun 2022, 23.503.598 orang pada tahun 2023, 24.417.110 orang pada tahun 2024, dan mencapai 24.506.852 orang pada tahun 2025. Kenaikan tersebut memperlihatkan Jawa Barat mempunyai ketersediaan tenaga kerja yang besar, seiring dengan jumlah penduduknya yang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Meningkatnya jumlah tenaga kerja diharapkan mampu memperbesar kapasitas produksi sehingga mendorong pertumbuhan ekonom. Selain didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, Provinsi Jawa Barat juga dikenal sebagai salah satu pusat industri pengolahan di Indonesia yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih menunjukkan perbedasan temuan mengenai pengaruh belanja modal, Investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menguji satu atau dua variabel, sedangkan penelitian yang mengkaji ketiga variabel tersebut dengan data terbaru secara simultan masih relatif terbatas. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus berfokus pada Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data terbaru juga masih jarang ditemukan. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi celah penelitian dengan menganalisis pengaruh belanja modal, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2011–2025.

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa dalam mendorong pertumbuhan ekonomin investasi dan tenaga kerja memiliki peran penting, meskipun dengan karakteristik yang berbeda pada setiap wilayah. Penelitian oleh (Bado, 2021) mengenai “Analisis Belanja Modal, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan” menemukan bahwa belanja modal dan tenaga kerja pengaruhnya positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi pengaruhnya negatif signifikan terada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Penelitian oleh (Ifani, 2021) mengenai “Analisis Pengaruh Belanja Modal, Investasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019” menunjukkan bahwa DAU dan belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi dan jumlah penduduk terbukti pnengaruhnya signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera selama periode penelitian 2015-2019.

Penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh belanja modal, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji ketiga variabel tersebut secara simultan masih relatif terbatas. Pada penelitian yang berfokus pada Provinsi Jawa Barat, sebagian besar penelitian terdahulu juga cenderung menggunakan data panel dengan unit analisis kabupaten/kota dan periode pengamatan yang relatif terbatas, sehingga lebih banyak menggambarkan perbedaan kondisi antarwilayah dibandingkan perkembangan hubungan antarvariabel pada tingkat provinsi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis pengaruh belanja modal, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data time series dalam periode yang lebih panjang dan mutakhir, yaitu 2011–2025.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada guna memperoleh dan memahami pemahaman secara lebih mendalam terkait beberapa faktor yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, maka penggunaan variabel yang lebih spesifik menjadi penting untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat dan relevan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal meskipun didukung oleh potensi ekonomi yang besar menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi.

Dari beberapa penelitian terdahulu masih ditemukan adanya celah penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam menguraikan variabel-variabel tersebut ke dalam bentuk yang lebih spesifik dan representatif. Dengan demikian, dilakukannya penelitian ini berupaya untuk analisis lebih lanjut pengaruh belanja modal, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih terbaru dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan uraian, Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Belanja Modal pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terkait pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat

2. Untuk menganalisis terkait pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk menganalisis terkait pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh belanja modal, investasi, dan tenagakerja terhadap pertumbuhann ekonomi di Provinis Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan PDRB sebagai variabel terikat. Sementara itu, belanja modal, investasi, dan tenaga kerja digunakan sebagai variabel bebas. Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Perdagangan (Kemendag), dan DJPK Kemenkeu. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tingkat provinsi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, manfaat yang dijelaskan berikut ini diharapkan dapat memberikan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Instansi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat meggunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun serta mengevaluasi kebijakan ekonomi daerah. Informasi mengenai pengaruh belanja modal, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan. Selain itu, melalui

peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran daerah, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja, langkah langkah kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

b. Bagi Pembaca

Selain bermanfaat sebagai referensi ilmiah atau landasan perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai topik terkait khususnya analisis pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sama. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teori-teori ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pengolahan data secara ilmiah, serta sebagai wujud penerapan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.